

PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Faisal Yunan Siregar

Email : paisalcadaz@yahoo.com

Dibimbing oleh Dra. Ernawaty, M.Si

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

City Transportation stipulated in the Decree of the Minister of Transportation KM numbers. 35 of 2003 on the implementation of the road transport by public transport. The ministerial decree contains provisions in urban transportation. Problems that occur in Dumai still many Urban Transport netted in public passenger and freight operations were caught violating the license should be completed throughout the City Transportation partly also ineligible roadworthy this can cause problems with regard to the safety of passengers and road users other. Public confidence to use the City Transport began to diminish due to inconvenience in use. This is because of several City Transport which is not according to the standard of driving is reckless, smoking, stop halfway etc. Things like this which should be addressed by the Department of Transportation. So that people do not feel reluctant to use public facilities in transportation services. Improve oversight by observing impose sanctions and an evaluation of public transport that does not meet the criteria specified in the regulations. In imposing sanctions for drivers need good firmness and City Transport to the City Transportation companies provide socialization is because of weak regulatory oversight of public transport is also affected by the lack of knowledge of the Municipal Transport driver itself on the City Transportation standards.

Keywords: *Supervision, Sanctions, Evaluation*

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dan mempermudah hubungan dengan tempat lain. Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut terlihat semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari tempat yang satu ketempat yang lain. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang (*servicing sector*), pendorong (*promoting sector*) dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang

sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan.

Kota Dumai yang mempunyai tingkat perkembangan yang cukup tinggi baik dari aspek sosial ekonominya maupun pertambahan jumlah penduduknya. Masyarakat Kota Dumai yang pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan, pelayanan, industri dan jasa. Sangat bergantung pada angkutan umum penumpang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di samping kendaraan pribadi, baik untuk kawasan perkotaan maupun antar kota. Dinas Perhubungan Kota Dumai mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek

Angkutan Kota di Dumai. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Dumai adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa Angkutan Kota. Meski banyak dari masyarakat yang mengeluhkan tentang buruknya pelayanan Angkutan Kota dan efeknya terhadap lalu lintas, Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan banyak tindakan. Hal ini disebabkan jangka wewenang mereka hanyalah sebatas penyedia fasilitas dan pengawas.

Tabel Perjalanan Angkutan Kota (Angkot Serasi, Kopandu dan Makmur) Setiap Bulan Beroperasi di Kota Dumai Tahun 2013.

No.	Bulan	Beroperasi/rute
1.	Januari	700 Unit
2.	Februari	835 Unit
3.	Maret	1214 Unit
4.	April	1084 Unit
5.	Mei	1296 Unit
6.	Juni	1271 Unit
7.	Juli	963 Unit
8.	Agustus	845 Unit
9.	September	825 Unit
10.	Oktober	669 Unit
11.	November	561 Unit
12.	Desember	508 Unit
	Total	10.771 Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui perjalanan Angkutan Kota (Angkot Serasi, Kopandu dan Makmur) di Kota Dumai tahun 2013 setiap bulannya yang berjumlah 10.771 unit dalam per tahunnya melalui tarif retribusi yang dikutip oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai (Perda No. 24 Tahun 2011). Setiap perjalanan Angkutan Kota (angkot) mengalami penambahan dan penurunan perjalanan pada setiap bulannya. Selanjutnya dapat dilihat terjadinya penurunan perjalanan angkot yang signifikan secara berturut-turut setiap bulannya yang terjadi dibulan mei sampai dengan desember.

Permasalahan yang terjadi di Kota Dumai masih banyaknya Angkutan Kota yang terjaring dalam operasi penumpang umum dan barang yang kedapatan melakukan pelanggaran izin yang seharusnya dilengkapi seluruh Angkutan Kota sebagian juga tidak memenuhi syarat layak jalan hal ini dapat menimbulkan masalah berkaitan dengan keselamatan bagi penumpang dan pengguna jalan yang lain. Selain itu tumpang tindih trayek Angkutan Kota juga menjadi masalah yang harus diawasi agar tidak terjadi kemacetan maupun perselisihan dengan Angkutan Kota lainnya yang masih sering terjadi di Kota Dumai. Hal ini menjadi tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk mengawasi Angkutan Kota tersebut.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Angkutan Kota, saat ini telah dioperasikan pelayanan Angkutan Kota, yang terbagi dalam 8 trayek rute dimana 6 diantara semua rute menjadikan pusat kota sebagai tujuan akhir, karena kawasan pusat kota merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta perkantoran.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dishub Kota Dumai juga mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 tahun 2003

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Dimana keberadaan angkutan umum bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik dan layak antara lain mencakup pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan biaya murah. Berdasarkan fenomena diatas jelaslah bahwa pengawasan sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasar peraturan diatas, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka perlu ada perbaikan kongkrit dari aparaturnya untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik atau supir Angkutan Kota tersebut. Berdasarkan masalah diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengawasan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai”**

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis
 1. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah serta penulis menerapkan teori –teori yang didapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.
 2. Sebagai bahan perkembangan disiplin Ilmu Administrasi khususnya dibidang pelaksanaan.
- b. Praktis
 1. Secara bahan masukan dan informasi bagi pihak – pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.
 2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Dumai dan Dinas Perhubungan Kota Dumai maupun pihak - pihak yang terkait dengan penelitian ini.
 3. Sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi dalam melakukan penelitian lanjutan

D. KONSEP TEORITIS

1. Pengawasan

George R. Terry (2006:395) mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti *“Control is determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan”* artinya suatu tindakan yang mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, hal ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kerjadan jika diperlukan menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas – aktivitas yang direncanakan tersebut.

Manullang (2008:172) dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Menurut **Handoko (2003:359)** mengatakan bahwa pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dalam arti manajemen yang diformalkan tidak akan ada tanpa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengusahakan agar komitmen – komitmen yang telah dibuat dapat dilaksanakan. Menurut **Marnis (2008:329)** pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standard an tujuan organisasi yang diharapkan.

2. Manajemen

Menurut **Mary Parker Follet** dalam **T. Hani Handoko (1995:8)**, manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Defenisi dari Mary ini mengandung arti bahwa seorang pimpinan mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang – orang lain untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri.

Menurut **James A. F. Stoner** dalam **T. Hani Handoko (1982:8)**, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Luther Gullick dalam **T. Hani Handoko (1995:11)**, mendefinisikan manajemen

sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat. **Andrew F. Sikula** dalam melayu **S. P Hasibuan (2005:23)**, mengatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas – aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

3. Konsep Transportasi

Menurut **Nasution (1996 : 32)** menyatakan transportasi adalah pemindahan barang fisik dari tempat asal ketempat tujuan. Dalam hubungan ini terkait tiga hal yaitu :

1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya
3. Ada jalan yang dapat dilalui.

Sukanto (2002 : 15) membedakan transportasi menjadi dua yakni angkutan bermotor dan angkutan tidak bermotor. Angkutan bermotor adalah jenis angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor yang bergerak diatas jalan raya. Angkutan bermotor ini terdiri atas kendaraan umum dan pribadi. Angkutan umum berupa Angkutan Kota, Angkutan Kota ditinjau dari segi penawaran angkutan biasanya dibawah pengelolaan Pemko/Pemkab termasuk pembagian jalan pemilik angkutan. Sedangkan dari segi permintaan, masyarakat luas dapat memanfaatkan dengan membayar pemanfaatan serta membayar karcis. Dalam hal ini masyarakat memilih didalam menggunakan angkutan yang disediakan pemerintah dan swasta tergantung tarif atau servis yang diberikan dan semuanya

tergantung pada kebutuhan serta cita rasa konsumen.

Dalam kerangka ini kita ingin melihat Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai suatu organisasi Dinas Daerah. Menurut *J. Willian Schulze* dalam **Sutarto (2000:23)** organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang dihimpun. Kemudian Marshal *E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig* dalam **Sutarto (2000:30)** menyatakan organisasi adalah menghimpun secara teratur bagian-bagian yang saling bergantung untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bersatu padu dengan nama wewenang, koordinasi dan control dapat dilaksanakan untuk mencapai maksud tertentu.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan organisasi dalam organisasi

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi terjadi. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau mengubah pada variabel-variabel bebas,

tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Langkah – langkah itu adalah mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian dianalisa dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu berupa pernyataan – pernyataan jawaban dari informan penelitian, setelah dianalisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu mengenai tanggapan informan tentang kebersihan lingkungan khususnya sampah dan data – data jumlah armada, peralatan kebersihan maupun informasi lainnya yang diperlukan guna penelitian, serta data sekunder, data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari dokumentasi atau keterangan sumber – sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti.

Analisa data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dari instansi terkait dan sumber-sumber lain, kemudian data-data tersebut dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif atau dijabarkan sesuai dengan kenyataan Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai

Sektor transportasi memiliki peran yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa. Tidak hanya itu, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian yang sangat berpengaruh semua aspek perekonomian.

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang mengalami peningkatan mobilitas perjalanan. Dinas Perhubungan Kota Dumai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang perhubungan. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah berwenang dalam menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berupa izin Angkutan Kota. Berkaitan dengan izin trayek, adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di Kota Dumai tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran. Salah satu yang disorot adalah pelanggaran dalam bidang transportasi yakni perizinan trayek Angkutan Kota. Ada beberapa indikator untuk mengetahui Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, yaitu :

1. Prosedur pengurusan izin trayek
2. Pengawasan pendahuluan
3. Pengawasan concurrent
4. Pengawasan umpan balik

1. Prosedur Pengurusan Izin Trayek

Pengurusan izin trayek terlampir dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum pada pasal 45 ayat (1) bahwa : “ Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pemohon wajib memenuhi:

- a. Persyaratan administrative
- b. Persyaratan teknis

Keputusan menteri yang mengikat tentang persyaratam yang harus dimiliki saat mengajukan izin tayek didukung dengan pernyataan yang sama oleh Kepala Seksi Darat Dinas Perhubungan Kota Dumai.

- Persyaratan Administratif
- Persyaratn Teknis

Setiap perorangan atau perusahaan yang mengajukan izin trayek harus melengkapi syarat izin usaha angkutan yang mana secara prosedural dalamm pengurusan izin usaha angkutan setiap

perorangan atau perusahaan wajib melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan.

2. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan merupakan salah satu tahapan penting dari adanya suatu aturan. Yang mana dengan adanya suatu pengawasan kita dapat mengukur sejauh mana aturan tersebut sudah dilaksanakan atau dijalankan oleh suatu dinas. Yang mana pada bagian sebelumnya dijelaskan tentang syarat operasional dari Angkutan Kota adalah Izin Trayek. Dengan adanya peraturan yang mengatur, maka Dinas Perhubungan selaku Dinas yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap jalannya Angkutan Kota maka Dinas Perhubungan juga wajib mengawasi setiap ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap angkutan angkota yang berada di Dumai apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum. Dalam melaksanakan kewajibannya, Dinas Perhubungan telah memiliki program-pogram yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar/ tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang umumnya dikenal dengan istilah *Steering Control*. Setiap pengendara Angkutan Kota wajib menjalankan Angkutan Kota sesuai ketentuan yang ada. Yang mana setiap ketentuan tersebut wajib dijalankan oleh setiap pengemudi Angkutan Kota dan tetap harus ada kontrol/ pengawasan dari perusahaan Angkutan Kota jika Angkutan Kota tersebut merupakan Angkutan Kota yang berada dalam naungan organisasi. Sehingga organisasi atau pemilik dari Angkutan Kota benar-benar dapat mencari pengemudi Angkutan Kota yang berkualitas. Namun dari beberapa Angkutan Kota yang ada di Dumai masih banyak ditemukan supir Angkutan Kota yang melakukan pelanggaran. Supir Angkutan Kota di Dumai tidak mengetahui tentang berbagai aturan yang wajib dijalankan serta aturan yang tidak boleh

dilanggar. Karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh supir Angkutan Kota di Dumai ini menjadi penyebab sering terjadinya pelanggaran aturan-aturan serta ketentuan yang berlaku untuk Angkutan Kota. Dinas Perhubungan di Kota Dumai telah melakukan pemantauan Angkutan Kota yang dilaksanakan secara langsung kepada Angkutan Kota. Yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk Angkutan Kota.

3. Pengawasan Concurrent

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat menetapkan pelaksanaan dan saksi yang diberikan jika terjadi penyimpangan. Sanksi administrative diberikan jika ditemukan nya Angkutan Kota yang beroperasi tidak dalam kondisi standar fisik yang sudah ditentukan. Seperti ukuran, bentuk tulisan dan bentuk identitas kendaraan pada mobil Angkutan Kota. Maka dari itu dapat diketahui bahwa masih lemahnya pengawasan dan pengendalian dari Dinas Perhubungan Kota Dumai terhadap Angkutan Kota di Dumai karena dari pihak Dinas Perhubungan sendiri belum mampu menjalankan sanksi dan ketentuan yang berlaku sesuai standar yang telah ditetapkan. Sehingga dengan begitu dapat dikatakan peraturan belum berjalan maksimal karena pengawasan oleh Dinas Perhubungan yang tidak maksimal terhadap Angkutan Kota.

4. Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan ini untuk mengukur suatu kegiatan yang telah diselesaikan dengan kata lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagai upaya penegakan peraturan di bidang Angkutan Kota perlu didahului dengan meningkatkan intensitas rutin dari operasi penunbar, pembinaan dan sosialisasi tentang hukum kepada pelaku usaha baik individu maupun perusahaan Angkutan Kota di Kota Dumai. Sehingga tidak hanya perusahaan yang mengetahui ketentuan yang diberlakukan untuk Angkutan Kota, tetapi supir dari Angkutan Kota juga mengetahui ketentuan yang berlaku serta larangan dalam mengemudi Angkutan Kota di Kota Dumai. Karena dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan yang berlaku akan menyebabkan masalah baru dalam lalu lintas ataupun kemudian akan mengganggu kenyamanan dari penumpang Angkutan Kota sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan Angkutan Kota. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan Angkutan Kota mulai berkurang karena ketidaknyamanan dalam menggunakannya. Hal ini disebabkan dari beberapa Angkutan Kota yang tidak mengemudi sesuai standar yaitu ugal-ugalan, meroko, berhenti di tengah jalan dll. Hal-hal seperti inilah yang harusnya dapat dibenahi oleh Dinas Perhubungan. Agar tercipta kondisi yang nyaman saat berada dalam Angkutan Kota. Sehingga masyarakat tidak merasa enggan untuk menggunakan fasilitas umum dalam jasa angkutan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan Angkutan Kota di Kota Dumai. Disini penulis akan menguraikan faktor – faktor tersebut berdasarkan fakta yang didapat dari

lapangan dengan berpedoman pada teori *Tool Of Management* dari G.R. Terry. Adapun faktor – faktor tersebut sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Meski perintah – perintah pelaksanaan kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber – sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan program dalam kegiatan tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan baik secara prosedur, sistem, proses, dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan. Bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat melalui :

- a. Jumlah personil atau petugas dalam melakukan pekerjaan.
- b. Kesigapan dan kecakapan serta tanggung jawab petugas dalam melakukan pekerjaan.

2. Partisipasi Masyarakat

Faktor partisipasi masyarakat juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidak pelaksanaan suatu kegiatan. Maksud dari partisipasi masyarakat disini ialah keikutsertaan, kepedulian dan serta kesadaran masyarakat dalam pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai. Partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Angkutan Kota disini dapat berupa pengaduan atau pelaporan akan pelanggaran yang dilakukan Angkutan Kota tersebut.

3. Kesadaran Angkutan Kota

Kurangnya kesadaran para pemilik atau supir Angkutan Kota juga menjadi salah satu penghambat dalam pengawasan Angkutan Kota di Dumai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan tentang pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai. Maka dapat disimpulkan pengawasan tersebut belum dapat berjalan dengan baik dan maksimal. terbukti dengan masih banyaknya Angkutan Kota yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada yang berdampak pada kenyamanan masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini juga mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan angkutan sebagai alat transportasi umum dalam berkegiatan sehari hari yang dapat memberi keuntungan bagi pengendara Angkutan Kota itu sendiri. Ada pun hal tersebut dapat terlihat dari :

1. Tidak maksimalnya pengawasan pendahuluan. Masih banyak ditemukan Angkutan Kota yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pemberian sanksi terhadap Angkutan Kota yang beroperasi Belum ada ketegasan sanksi terhadap perusahaan atau supir Angkutan Kota yang beroperasi tidak sesuai dengan standar yang ada. Evaluasi terhadap Angkutan Kota. kepercayaan masyarakat untuk menggunakan Angkutan Kota mulai berkurang karena ketidaknyamanan dalam menggunakannya. Hal ini disebabkan dari beberapa Angkutan Kota yang tidak

mengemudi sesuai standar yaitu ugal-ugalan, merokok, berhenti di tengah jalan dll. Hal-hal seperti inilah yang harusnya dapat dibenahi oleh Dinas Perhubungan. Agar tercipta kondisi yang nyaman saat berada dalam Angkutan Kota. Sehingga masyarakat tidak merasa enggan untuk menggunakan fasilitas umum dalam jasa angkutan.

2. Selain itu terdapat faktor faktor penghambat yang mengakibatkan pengawasan Angkutan Kota ini tidak maksimal, yaitu : Sumber daya manusia. Masih adanya personel dari Dinas Perhubungan yang kurang memahami apa yang menjadi tugas nya dilapangan untuk mengawasi Angkutan Kota. Partisipasi masyarakat. Kurang nya partisipasi dari masyarakat menjadi faktor lemah nya pengawasan karena tidak adanya masukan kepada Dinas Perhubungan sehingga Dinas Perhubungan sendiri tidak dapat melakukan evaluasi secara baik.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, peneliti mencoba memberi saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan dengan mengamati memberikan sanksi dan melakukan evaluasi terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi kriteria dalam peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pemberian sanksi perlu ketegasan baik bagi supir Angkutan Kota maupun terhadap perusahaan Angkutan Kota tersebut.
2. Memberikan sosialisasi terhadap peraturan tersebut karna lemahnya pengawasan terhadap angkutan umum juga dipengaruhi oleh

kurang pengetahuan supir Angkutan Kota itu sendiri tentang standar Angkutan Kota itu. Hal ini perlu dilakukan terhadap pemilik perusahaan Angkutan Kota serta supir Angkutan Kota itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anthony J Catanese & James C Snyder. 1992. *Perencanaan Transportasi Kota*, terjemahan Oleh Catherine L ross. Erlangga, Jakarta.
- Asikin, Muslich Zainal. 2001. *Sistem Manajemen Transportasi, Menuju Pelayanan Publik yang Aman dan Nyaman*. Philosopy Press, Yogyakarta.
- Assauri, Sofyan. 1987. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Earl P. Strong, Malayu S. P. Hasibuan, G. R. Terry, Harold Koontz, Cyril O'Donnel, 2001, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- George R. Terry 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*.
- Griffin, Ricky, W., 2004. *Manajemen, Edisi Ketujuh, Jilid 2*. Penerjemah: Gina Gania, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Handoko, T Hani. 2003. *Management Edisi 2*. BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Bumi Aksara, Jakarta.

- Henry Fayol 2007. *administration, Industrielle et Generale*.
- Herujito, Y.M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Grasindo, Jakarta.
- Manullang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marbun, BN. 1990. *Kota Indonesia Masa Depan Masalah dan Prospek*. Erlangga, Jakarta.
- Marnis 2008. *Pengantar Manajemen*. Unri Press, Pekanbaru.
- Nasution, H.M.N. 1996. *Manajemen Transportasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Robbins, Stephen P, 2002. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. PT Erlangga, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Silalahi, G.A., 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Citramedia, Sidoarjo.
- Sukanto, 2002. *Perencanaan Pembangunan dan Sistem Informasi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sutarto.2000. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Winardi, J, 2000. *Motivasi dan Pemasalahan dalam Manajemen*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Karya Ilmiah

- Riawli, Rusydi. 2013. *Pengawasan Dalam Pengelolaan Terumbu Karang di Kota Batam*, Pekanbaru: Universitas Riau.